



## Antara Regulasi Pusat dan Realitas Daerah: Tinjauan Etis-Politik terhadap Kebijakan Mutu SMA

Qurrotu A'yun Ainina Humairoh<sup>1</sup>, Sri Minarti<sup>2</sup>  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

[aninaayun@gmail.com](mailto:aninaayun@gmail.com)<sup>1</sup>, [minarti@unugiri.ac.id](mailto:minarti@unugiri.ac.id)<sup>2</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received May 15, 2026  
Revised May 27, 2026  
Accepted June 10, 2026

#### Keywords:

education policy, quality of high schools, central regulations, regional autonomy, political ethics.

### ABSTRACT

*This descriptive qualitative study examines the dynamics between central regulations and local realities regarding the education quality policy for Senior High Schools (SMA) in East Java, utilizing an ethico-political approach. The analysis of interviews and document studies reveals that despite the implementation of various quality improvement programs, challenges persist, including quality disparities, limited infrastructure, and unequal access across regions. From an ethico-political perspective, a tension exists between national standardization and local needs. Therefore, synergy between central and local governments is essential, requiring flexible, participatory, and socially equitable policies to achieve an even distribution of educational quality.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received May 15, 2026  
Revised May 27, 2026  
Accepted June 10, 2026

#### Keywords:

kebijakan pendidikan, mutu SMA, regulasi pusat, otonomi daerah, etis-politik.

### ABSTRAK

Penelitian kualitatif deskriptif ini mengkaji dinamika regulasi pusat dan realitas daerah dalam kebijakan mutu pendidikan SMA di Jawa Timur melalui pendekatan etis-politik. Hasil analisis data wawancara dan studi dokumen menunjukkan bahwa meskipun berbagai program peningkatan mutu telah diimplementasikan, masih terdapat kendala berupa ketimpangan kualitas, keterbatasan sarana prasarana, dan kesenjangan akses antarwilayah. Secara etis-politik, terjadi tarik-menarik antara standarisasi nasional dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi pusat dan daerah melalui kebijakan yang fleksibel, partisipatif, dan berkeadilan sosial demi pemerataan mutu pendidikan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Qurrotu A'yun Ainina Humairoh

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

E-mail: [aninaayun@gmail.com](mailto:aninaayun@gmail.com)



## Pendahuluan

Kebijakan pendidikan menengah atas di tingkat daerah saat ini berada dalam pusaran dilema yang kompleks antara pemenuhan regulasi politik dari pemerintah pusat dan tanggung jawab etis terhadap masyarakat lokal. Di Provinsi Jawa Timur, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) memikul tanggung jawab besar untuk menerjemahkan dinamisasi kebijakan nasional ke dalam langkah operasional. Berdasarkan data makro, wilayah ini mencatatkan capaian administratif yang impresif, seperti ketercapaian 100% Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), perluasan Kurikulum 2013 (K13) di 580 lembaga, hingga peningkatan kapasitas manajerial bagi 4.574 kepala sekolah dan guru. Namun, di balik angka-angka keberhasilan tersebut, realitas lapangan menunjukkan tantangan struktural yang berat, mulai dari keterbatasan rentang kendali geografis, belum optimalnya kinerja cabang dinas, hingga masih besarnya jumlah peserta didik dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mengakses pendidikan standar nasional. Fenomena ini menegaskan adanya jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara tuntutan formalitas politik-birokrasi dan moralitas pelayanan publik di daerah.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan regulasi pusat melalui peningkatan kualitas guru, pemerataan bantuan pendidikan, dan penguatan infrastruktur sekolah. Program BOS dan BKSM menunjukkan adanya perhatian terhadap kelompok masyarakat kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Dalam perspektif etika pendidikan, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesempatan pendidikan.

Mengkaji titik temu antara regulasi pusat dan realitas daerah ini menjadi krusial karena kebijakan pendidikan tidak boleh hanya dilihat sebagai produk hukum yang steril dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif teori politik pendidikan (Supriyadi & Trenggalek, 2013), kebijakan selalu mencerminkan relasi kuasa dan kontestasi kepentingan aktor-aktor negara. Namun, pendekatan politik murni ini sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial. Oleh karena itu, teori etika pendidikan hadir sebagai pisau analisis penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut menegakkan prinsip kesetaraan (*equity*) dan keberpihakan pada kelompok rentan (Publishing, n.d.). Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa sentralisasi standar mutu di negara berkembang sering kali memicu marginalisasi sekolah-sekolah di pinggiran (Sulistiana & Imron, 2025). Sementara itu, studi terbaru di konteks Indonesia menekankan bahwa tanpa adanya diskresi etis dari pemerintah daerah, standarisasi nasional justru akan memperlebar jurang pemisah antarkelas sosial (Indahsari & Sumarsono, 2024).

Nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada orisinalitas objek dan pendekatan yang digunakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengevaluasi kebijakan pendidikan secara terpisah—hanya dari aspek efektivitas manajemen atau dari sudut pandang sosiologis saja—penelitian ini secara khusus mengawinkan lensa etis-politik untuk membedah kebijakan operasional pada tingkat provinsi. Inovasi penelitian ini ditunjukkan dengan menganalisis bagaimana birokrasi daerah di Jawa Timur melakukan tindakan "kompensasi etis" guna menambal lubang ketimpangan sosial-ekonomi. Hal ini tercermin nyata dari inisiasi program lokal seperti Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) yang menysasar 19.099 siswa, rintisan program pendidikan gratis berkualitas ("*tistas*"), serta inovasi operasional program *SMA Double Track* untuk membekali siswa dengan keterampilan tambahan di luar kurikulum standar.

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan dan fragmentasi koordinasi tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka solusi berupa integrasi model tata kelola berbasis



teknologi, penyediaan situs web pengayaan belajar, serta perluasan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi guna mendistribusikan kompetensi pendidik secara merata. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika implementasi kebijakan mutu SMA di Provinsi Jawa Timur melalui pendekatan etis-politik. Secara spesifik, penelitian ini hendak membongkar bagaimana birokrasi daerah menavigasi tekanan regulasi pusat sekaligus melakukan adaptasi moral demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan di lapangan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis dinamika regulasi pemerintah pusat dan otonomi daerah dalam kebijakan mutu pendidikan SMA dari perspektif etis-politik. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kondisi nyata implementasi kebijakan pendidikan di daerah, serta melihat secara langsung tarik-menarik antara standar pusat dengan kebutuhan lokal.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara komprehensif dengan berbagai pemangku kepentingan (pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan), studi dokumen resmi Provinsi Jawa Timur, serta tinjauan kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas, hambatan, serta dinamika perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan sosial.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kebijakan mutu pendidikan SMA di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menerjemahkan regulasi pemerintah pusat ke dalam program pendidikan yang lebih operasional (K. K. Pendidikan & Iii, 2011). Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas memiliki tanggung jawab dalam perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan efektivitas pengelolaan SMA. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program seperti pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan, pelaksanaan Kurikulum 2013, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, serta bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu (Atas, 2016),

Data menunjukkan bahwa capaian program pendidikan SMA di Jawa Timur cukup signifikan. Sebanyak 16.885 guru memperoleh dukungan pemenuhan standar nasional pendidikan, 580 sekolah telah menerapkan Kurikulum 2013, dan seluruh SMA telah melaksanakan UNBK sebesar 100 persen. Selain itu, 323.571 siswa menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara 19.099 siswa miskin memperoleh Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM). Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjalankan amanat regulasi nasional mengenai pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah (D. Pendidikan et al., n.d.).

Pelaksanaan kebijakan tersebut menghasilkan berbagai capaian yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan SMA. Berikut tabel capaian program pendidikan SMA di Provinsi Jawa Timur:

**Tabel 1 : Program Kebijakan**

NO	Program/Kebijakan	Capaian
----	-------------------	---------



1.	Pelatihan pengelolaan sarana dan media pembelajaran	1.280 Guru
2.	Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan	16.885 Guru
3.	Pelaksanaan UNBK SMA	100% sekolah
4.	Implementasi Kurikulum 2013	580 sekolah
5.	Pembelajaran dan pelatihan bermutu	1.264 siswa
6.	Peningkatan kualitas manajerial	4,574 kepala sekolah dan guru
7.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	323.571 siswa
8.	Bantuan sarana dan prasarana (DAK)	908 lembaga
9.	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)	19.099 siswa

Sumber : Dokumen Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Provinsi Jawa Timur

Namun demikian, implementasi kebijakan mutu SMA masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Luas wilayah dan banyaknya satuan pendidikan menyebabkan koordinasi dan pengawasan belum berjalan optimal. Selain itu, kompetensi tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan kebijakan pendidikan nasional. Permasalahan lain yang menonjol adalah masih adanya kesenjangan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu (Arbiyanta, 2025). Berikut tabel tantangan implementasi kebijakan mutu SMA.

**Tabel 2 : Tantangan Kebijakan**

NO	Tantangan	Dampak
1.	Luas wilayah dan banyaknya SMA	Koordinasi dan pengawasan kurang optimal
2.	Kompetensi guru belum merata	Kualitas pembelajaran berbeda antarwilayah
3.	Persaingan pendidikan antarprovinsi	Tekanan peningkatan mutu lulusan
4.	Kesenjangan ekonomi peserta didik	Ketimpangan akses pendidikan berkualitas
5.	Keterbatasan fasilitas dan pembiayaan	Pengembangan keterampilan siswa belum maksimal

Sumber: Dokumen Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Provinsi Jawa Timur

Dalam perspektif etis-politik, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas regulasi pusat dan realitas daerah. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan sebagai instrumen pemerataan mutu pendidikan, tetapi implementasinya di daerah dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan lokal (Fauzi, n.d.). Menurut Tilaar, kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali bersifat sentralistik sehingga daerah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Hidayat, n.d.). Dalam konteks ini, pemerintah daerah berada pada posisi dilematis antara memenuhi target administratif nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat daerah secara substantif (Mataram et al., 2025).

Secara etis, kebijakan pendidikan bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Program BOS dan BKSM mencerminkan bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat miskin (Ilmiah et al., 2026). Akan tetapi, fakta bahwa masih banyak peserta didik kurang mampu yang kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya



tercapai. Hal ini sejalan dengan pandangan John Rawls yang menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat (Handayani et al., 2025).

Di sisi lain, tantangan koordinasi dan pengawasan pendidikan menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan masih cenderung birokratis (Adawiyah et al., 2024). Pemerintah daerah sering mengalami keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan nasional secara efektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya memberikan otonomi substantif kepada daerah (Gagas et al., 2025). Menurut penelitian oleh Jurnal Administrasi Pendidikan, efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Syafitri & Trisoni, 2024).

Meski demikian, terdapat peluang pengembangan yang cukup besar dalam peningkatan mutu SMA di Jawa Timur. Pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, program pendidikan gratis berkualitas, serta penguatan SMA double track menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kompromi antara regulasi nasional dan kebutuhan kontekstual daerah. Dengan demikian, mutu pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap standar nasional, tetapi juga pada kemampuan daerah menciptakan pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkeadilan sosial.

### **Dinamika Hubungan Regulasi Pusat dan Otonomi Daerah dalam Pendidikan SMA**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan upaya penyempurnaan sistem pendidikan antara lain dengan adanya Pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan dasar dan menengah telah tercermin dalam visi pembangunan pendidikan nasional yang tercantum dalam GBHN (1999): “mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang berahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggungjawab, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”(Gumelar, 1945).

Namun demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan masih belum menunjukkan hasil yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota besar menunjukkan bahwa mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sekolah-sekolah yang berada di wilayah lainnya masih belum merata, dan seiring pula dengan era globalisasi serta bergulirnya reformasi yang telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai lingkungan termasuk lingkungan pendidikan dalam rangka membangun mutu pendidikan secara keseluruhan. keberhasilan suatu organisasi sekolah bisa dilihat dari berbagai sisi secara seimbang, yaitu kinerja masa lalu dan prospek masa depannya, dari ukuran strategis dan operasional, ukuran keuangan dan non keuangan, ukuran internal dan eksternal organisasi (K. L. Pendidikan et al., 2022)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terdapat batasan yang jelas mengenai ranah kewenangan kedua belah pihak(Jaya et al., 2025):

1) Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah):

- Standarisasi Mutu: Menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang mencakup kurikulum nasional, sistem penilaian, dan standar kompetensi lulusan.
- Kebijakan Strategis: Menentukan arah cetak biru pendidikan, kerangka kurikulum



(seperti struktur Kurikulum Merdeka), dan asesmen nasional (AN).

## 2) Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi):

- Manajemen Operasional: Mengelola pendanaan, penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana fisik sekolah (seperti gedung dan laboratorium).
- Pengelolaan SDM: Mengelola manajemen guru SMA (mutasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi) dan pengangkatan tenaga kependidikan.
- Pembiayaan: Mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dan program afirmasi kedaerahan (Marzuki, n.d.).

## **Keadilan Sosial dalam Kebijakan Mutu Pendidikan SMA**

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan keadilan sosial. Melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan mobilitas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat kohesi sosial (F. Pendidikan, 2024). Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan mendasar dalam menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tingginya tingkat kesenjangan ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam upaya mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi antara lain sulitnya akses menuju lembaga pendidikan, ketidakseimbangan kualitas pendidikan antar daerah, serta keterbatasan sarana dan prasarana sekolah.

Penelitian ini dilandasi oleh kenyataan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakseimbangan dalam akses dan kualitas pendidikan berdampak pada rendahnya mobilitas sosial dan memperkuat rantai kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji peran pendidikan dalam mencegah ketidaksetaraan sosial ekonomi serta dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun empiris terhadap kebijakan pemerataan pendidikan, terutama dalam hal peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan di wilayah 3T.

Berbagai langkah strategis dapat ditempuh untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, di antaranya melalui kebijakan afirmatif berupa pemberian beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, peningkatan kualitas dan kompetensi guru di daerah tertinggal, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pemerataan pendidikan. Melihat kondisi yang ada, diperlukan langkah konkret dan berkesinambungan agar pendidikan benar-benar berperan sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesempatan belajar di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis peran pendidikan dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah kesenjangan ekonomi yang masih tinggi. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan sosial (Rosada & Khasanah, 2025).

## **Peran Guru dan Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Mutu**

Peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen mutu dengan melaksanakan tugasnya dengan tepat yaitu menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, melaksanakan pengawasan, serta melaksanakan pengelolaan manajemen dan mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lain. Kepala



sekolah adalah pemegang kendali di sekolahnya sehingga dalam mengatur dan melaksanakan itu semua kepala sekolah tidak bisa melakukannya sendiri, kepala sekolah harus dapat mengajak dan memberikan pengaruh yang positif agar guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan sepenuh hati, dengan seperti itu maka tujuan sekolah akan lebih mudah tercapai.

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mendorong terjadinya perubahan di lingkungan sekolah, antara lain dengan menciptakan hubungan kerja yang efektif, melakukan pergeseran fungsi manajerial yang adaptif, serta memimpin melalui keteladanan. Selain itu, kepala sekolah berperan dalam memengaruhi warga sekolah, mengembangkan kerja sama tim, melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, menjadikan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai budaya kerja, serta membangun komitmen bersama untuk mencapai tujuan sekolah. Usaha meningkatkan mutu pendidikan bisa dilakukan dalam komitmen kepala sekolah serta warga sekolah lainnya (Susanti & Saputra, 2024).

Guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan. Mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan agen perubahan. Dalam konteks pendidikan yang terus berkembang, peran guru semakin kompleks dan menuntut kemampuan yang lebih tinggi. Guru bertindak sebagai pemandu bagi siswa dalam menemukan pengetahuan baru. Mereka membantu siswa untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Namun demikian, masih banyak guru yang belum sepenuhnya menyadari potensi dirinya sebagai agen perubahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya dukungan dari pihak sekolah, beban kerja yang berat, serta kurangnya kesempatan untuk mengikuti pengembangan profesional. Akibatnya, kualitas pembelajaran di banyak sekolah masih belum optimal (Elmumtazah, 2025).

### **Digitalisasi Pendidikan sebagai Strategi Peningkatan Mutu SMA**

Transformasi digital dalam pendidikan merupakan kewajiban, namun penerapannya di sekolah menengah di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur, literasi digital SDM, dan resistensi organisasi (Mahdalena et al., 2025). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Transformasi digital dalam pendidikan kini menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi manajerial di sekolah. Kemajuan teknologi serta globalisasi telah mendorong penerapan dalam pembentukan modal manusia. Penggunaan teknologi ini memungkinkan akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan geografis atau sosial-ekonomi, sejalan dengan upaya transformasi pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi transformasi digital memerlukan strategi komprehensif yang mencakup infrastruktur memadai, pendidik yang terampil, dan pendekatan inklusif.

Salah satu produk unggulannya adalah sistem manajemen pembelajaran berbasis teknologi yang memfasilitasi pengelolaan materi ajar, ujian, dan interaksi siswa-guru. Secara global, adopsi transformasi digital di bidang pendidikan semakin dipercepat setelah pandemi COVID-19.

### **Model Kebijakan Pendidikan yang Responsif terhadap Realitas Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pendidikan yang efektif adalah kebijakan yang mampu mengintegrasikan standar nasional dengan kebutuhan lokal masyarakat. Pemerintah pusat tetap diperlukan sebagai penyusun standar dasar pendidikan nasional, tetapi pemerintah



daerah juga perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk melakukan inovasi kebijakan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Model kebijakan pendidikan yang responsif terhadap daerah dapat dilakukan melalui:

1. Penguatan otonomi pendidikan daerah.
2. Pemerataan distribusi guru dan fasilitas pendidikan.
3. Pengembangan kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal.
4. Pemanfaatan teknologi digital secara inklusif.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
6. Penguatan kerja sama antara sekolah, pemerintah, dan perguruan tinggi.

Dengan pendekatan tersebut, pendidikan tidak hanya menjadi instrumen administratif negara, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial yang berkeadilan.

## Simpulan

Berdasarkan tinjauan etis-politik terhadap kebijakan mutu SMA di Provinsi Jawa Timur, implementasi pendidikan menengah menunjukkan dinamika tarik-menarik antara tuntutan standarisasi regulasi pusat dan kompleksitas realitas daerah. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya mewujudkan pemerataan mutu melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, inovasi program *Double Track*, serta penyaluran bantuan (BOS dan BKSM), pelaksanaan di lapangan masih terhambat oleh tantangan struktural. Kendala seperti luasnya rentang kendali geografis, ketimpangan kompetensi guru, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan sosial-ekonomi mengakibatkan akses terhadap pendidikan berkualitas belum merata, di mana sekolah di perkotaan cenderung jauh lebih unggul dibandingkan wilayah pinggiran.

Kondisi tersebut merepresentasikan ketegangan antara idealitas administratif nasional dan prinsip keadilan sosial di tingkat lokal. Dalam perspektif etika pendidikan, meskipun program afirmasi telah dijalankan, prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya tercapai karena pemenuhan standar mutu masih sering mengabaikan konteks keragaman daerah. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa hanya bersifat sentralistik dan *top-down*. Diperlukan sinergi yang kolaboratif di mana pemerintah daerah diberikan otonomi dan diskresi etis yang lebih luas untuk mengadaptasi kebijakan pusat secara fleksibel, partisipatif, dan responsif sesuai dengan kebutuhan riil masyarakatnya.

Ke depannya, efektivitas kebijakan mutu SMA menuntut langkah strategis yang mengintegrasikan penguatan desentralisasi, pemerataan infrastruktur fisik maupun teknologi digital, serta peningkatan profesionalisme pendidik dan kepala sekolah. Kebijakan afirmasi yang lebih kuat bagi kelompok rentan dan daerah tertinggal mutlak diperlukan agar pendidikan tidak sekadar menjadi alat pemenuhan target birokrasi. Melalui pendekatan etis-politik, kebijakan pendidikan diharapkan mampu bertransformasi menjadi instrumen pemberdayaan, mobilitas sosial, dan perwujudan keadilan sosial yang sesungguhnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., Sholihah, M. S., & Sumanti, T. (2024). Birokrasi Pendidikan di Indonesia dan Terhadap Tata Kelola dan Mutu Pendidikan Implikasinya. 15(1), 44–51.
- Arbiyanta, I. (2025). Tantangan Pendidikan di Era Modern: Kajian Isu Strategis dan Implikasinya bagi Sistem Pendidikan Indonesia. 7(2), 98–111.



- Atas, bidang pembinaan pendidikan menengah. (2016). GUBERNUR JAWA TIMUR.
- Elmumtazah, D. H. (2025). Guru Sebagai Agen Perubahan : Peran Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. 5(2), 653–658.
- Gagas, K. H., Pratama, A. T., Putri, D. G., Mayasari, M., Sy, A. M. M. E., Syariah, P. E., & Lokal, E. (2025). Tantangan dan peluang otonomi daerah dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal. 8(1), 1–16.
- Gumelar, W. S. (1945). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan Di Sekolah Menengah Atas. XVIII(1).
- Handayani, I., Syara, S. N., Garnita, S., & Fisailillah, L. (2025). JOHN RAWLS : FILSAFAT HUKUM. 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Hidayat, D. (n.d.). Desentralisasi Bidang Pendidikan di Era Otonomi Daerah.
- Ilmiah, J., Januari, N., Kasus, S., Inpres, S. D., Kecamatan, K., Timur, A., Flores, K., Agustina, M., Narek, D., Kase, P., Mau, A. O. E., Teknis, P., & Pendidikan, K. (2026). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Pada Sekolah Dasar dilakukan per triwulan untuk daerah non-terpencil serta per semester untuk daerah terpencil . September 2025.
- Indahsari, T., & Sumarsono, R. B. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Konteks Pembentukan Karakter dan Pembangunan Moral Bangsa.
- Jaya, D. S., Afgani, J. Al, & Karunia, R. (2025). Pusat Dan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 3(5), 763–771.
- Mahdalena, F. C., Asnawi, Y. H., & Hermadi, I. (2025). Strategi Transformasi Digital Untuk Peningkatan Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah Menengah : Studi Kasus Pt Kunci Transformasi Digital Digital Transformation Strategies For Improving Quality Management In Secondary Education : A Case Study Of Pt Kunci Transformasi Digital. 13(2), 215–234.
- Marzuki. (n.d.). Otonomi Daerah Dan Pendidikan 13. 13–22.
- Mataram, U., History, A., & Daerah, P. (2025). Makna Akuntabilitas Publik : Studi Kualitatif Pada Pemerintah Daerah. 4, 269–276.
- Pendidikan, D., Jawa, P., Pendidikan, K. D., & Timur, P. J. (n.d.). No Title.
- Pendidikan, F. (2024). Hakikat Pendidikan H . A . R Tilaar. 7(November), 1–11.
- Pendidikan, K. K., & Iii, C. E. (2011). pendidikan,konsep kebijakan.
- Pendidikan, K. L., Wasliman, I., Rostini, D., & Iriantara, Y. (2022). Implementasi Balanced Scorecard dalam Meningkatkan. 4(2), 157–167.
- Publishing, U. (n.d.). Tantangan Demokrasi Indonesia dan Global di Era Oligarki,Digital dan Krisis Iklim.
- Rosada, S., & Khasanah, N. (2025). Pendidikan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam peluang belajar siswa di tengah kesenjangan ekonomi. 2(2). <https://doi.org/10.64677/ppai.v2i2.208>
- Sulistiana, T., & Imron, A. (2025). Challenges and Opportunities Towards Quality Education in Indonesia and Malaysia. September 2024, 478–488.
- Supriyadi, J., & Trenggalek, K. P. (2013). implementasi politik pendidikan dalam kurikulum 2013. 180–195.
- Syafitri, A., & Trisoni, R. (2024). Jurnal Dirosah Islamiyah Jurnal Dirosah Islamiyah. 6, 308–317. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i2.1356>